

## Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945- 1950

Laessach M Pakatuwo, Mustari Bosra, Ahmadin

Mahasiswa Angkatan 2014, Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM  
[Essachmoch@gmail.com](mailto:Essachmoch@gmail.com)

### *Abstrak*

Penelitian ini membahas tentang latar belakang terbentuknya pemerintahan Kota Makassar dan perkembangan Kota Makassar dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga Revolusi Fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal pembentukan pemerintahan kota di Makassar baru terbentuk di masa akhir pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pada awal abad ke-20 setelah diundangkannya Undang-undang Desentralisasi tahun 1903. Diundangkannya peraturan tersebut sedikit banyak membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan di Hindia Belanda. Pada tahun 1906 daerah Makassar mendapatkan status otonom menjadi sebuah kota berdasarkan Ordonansi 12 Maret 1906 *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 171 tahun 1906 terhitung sejak 1 April 1906 walaupun demikian roda pemerintahan baru dapat berjalan secara defenitif sejak diangkatnya Mr.J.E Dambrik selaku walikota pada tahun 1918 hingga berakhir 1927. Pemerintahan Kota Makassar masih tetap di pertahankan ketika Jepang berhasil menduduki Kota Makassar. Adapun yang bertindak sebagai pejabat walikota adalah Yamasaki. Ketika memasuki masa kemerdekaan, Kota Makassar mengalami perkembangan yang begitu pesat pada tahun 1950. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya pemerintahan di Kota Makassar tidak terlepas dari undang-undang Desentralisasi yang kemudian membawa dampak yang besar dalam sejarah perkembangan Kota Makassar.

**Kata Kunci :** Kolonial Hindia Belanda, Kota Makassar

### *Abstract*

This study discusses the background of the formation of the Makassar City government and the development of Makassar City from the Dutch East Indies colonial period until the Physical Revolution. The results showed that the initial formation of city government in Makassar was only formed in the late Dutch colonial rule, namely at the beginning of the 20th century after the promulgation of the Decentralization Act of 1903. The promulgation of these regulations brought about a change in the governance system in the Dutch East Indies. In 1906 the Makassar region gained an autonomous status as a city based on the Ordinance of March 12, 1906, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Number 171 of 1906, effective April 1, 1906, although the new government wheel could run definitively since the appointment of Mr.JE Dambrik as mayor in 1918 until the end of 1927. The Makassar City Government was still maintained when Japan succeeded in occupying the City of Makassar. As for acting as mayor's official is Yamasaki. When entering independence, Makassar City experienced a rapid development in 1950. It can be concluded that the formation of government in the city of Makassar was inseparable from the decentralization law which then had a major impact in the history of the development of Makassar City.

**Keywords:** *Kolonial Dutch East Indies, Makassar City*

### A. Pendahuluan

Pemerintahan kota adalah sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah secara otonom. Pada saat ini lembaga pemerintahan kota memiliki wewenang setingkat dengan lembaga pemerintahan kabupaten.

Pemerintahan kota merupakan hal baru di Indonesia, artinya lembaga tersebut pada awalnya belum ada. Pemerintahan kota, baru terbentuk atau dibentuk pada akhir masa kolonial Belanda, yaitu pada awal abad ke-20 setelah diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 (Basundoro, 2012). diundangkannya peraturan tersebut sedikit banyak membawa perubahan pada tatanan pemerintahan di Hindia Belanda. Salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari diberlakukannya peraturan tersebut adalah Makassar.

Tahun 1906 daerah Makassar mendapatkan status otonom menjadi sebuah kota dengan status *Gementee* Makassar berdasarkan *Ordonansi* 12 Maret 1906 *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Nomor 171 tahun 1906 terhitung sejak 1 April 1906. (Sukatanya, 2000)

Peneliti mencoba untuk menggambarkan tentang keadaan kota makassar pada masa revolusi tahun 1945 setelah kekalahan jepang atas amerika hingga tahun 1950. Dalam kurun waktu ini peneliti menggambarkan tentang keadaan kota makassar mulai dari aspek politik, social, ekonomi dan pemberontakan yang terjadi di kota makassar.

Perbedaan penelitian ini dengan Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Vibran Anwar yang berjudul *Terbentuknya Kota Pelabuhan Makassar : Studi Kasus Tongak Awal Pembentukan Kota Makassar pada Masa Kerajaan Gowa Tahun 1510-1653*. Secara ringkas skripsi ini membahas terbentuknya “embrio kota” Makassar yang dimulai dari pengembangan pelabuhan Somba Opu atau Pelabuhan Makassar.

Buku berjudul *Makassar Nol Kilometer*. buku, yang sebenarnya merupakan kumpulan tulisan, mencoba menyajikan wajah Makassar melalui budaya-pop. Buku Kedua, *Makassar Nol Kilometer : Jurnalisme Plat Kuning* juga menceritakan wajah Makassar yang lain, dari meja warkop sampai riuh festival rock, Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perkembangan awal Kota Makassar pada masa Hindia-Belanda, Masa Pendudukan Jepang serta pada Masa Revolusi Fisik di kota Makassar.

### B. Metode Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Heuristik

Tahapan pengumpulan sebanyak-banyaknya sumber sejarah yang relevan dengan tulisan yang akan dikaji. Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyewitness*). Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Sedangkan sumber data sekunder. Data skunder yang dimaksud berupa buku buku, jurnal, laporan penelitian dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut di peroleh dari beberapa lembaga di makassar seperti: perpustakaan pusat UNM perpustakaan jurusan pendidikan sejarah, tokoh tokoh buku yang ada di Makassar dan koleksi perorangan yang ada kaitan secara langsung dengan yang penulis teliti.

#### 2. Kritik Sumber

Kritik sumber berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber sumber yang autentik (asli). Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut, atau biasa disebut kritik eksternal. Sedangkan penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dikenal dengan istilah kritik internal. Tahap penyeleksiannya

harus sistematis, yakni diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Jika tahap pertama suatu sumber sejarah tidak memenuhi syarat sebuah sumber sejarah (dari segi otentisitasnya), tidak perlu dilanjutkan verifikasi berikutnya

### 3. Interpretasi

Interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber sehingga akan terkumpul bagian-bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Tidak jarang pada tahap ini ditemukan subjektivitas dalam penulisan sejarah karena adanya perbedaan pandangan. Kecermatan dalam membaca sumber sangat dibutuhkan karena tidak semua sumber dapat dijadikan fakta. menginterpretasikan sumber akan sangat membantu dalam penulisan sejarah karena ditahapan ini apa yang menjadi pertanyaan dalam topik penelitian akan terjawab (Arsyad, 2018).

### 4. Historiografi

Historiografi berarti penulisan sejarah, tahap ini merupakan penyajian atas berbagai fakta yang telah terkumpul. Ditahap ini juga fakta-fakta sejarah diinterpretasikan dan kemudian penulis menyampaikan sintesa yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan dan disampaikan dalam bentuk karya ilmiah atau tulisan.

## C. Tinjauan Penelitian

Kota Makassar bertambah luasnya dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 yang berisi perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dengan tiga Kabupaten lainnya yakni Maros, Gowa dan Pangkep. berdasarkan peraturan tersebut wilayah Makassar bertambah dari 25 km<sup>2</sup> menjadi 175 km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 1905 berpenduduk 26.000 jiwa termasuk 100 orang Eropa 4.600 orang China dan sekitar 200 orang Timur asing lainnya. Ketiga kelompok ini meningkat 50 persen yakni 39.000 orang yang terdiri dari

1.500 orang Eropa, 6.900, orang Cina ,300 orang timur jauh dan 30.300 bumiputera . pada tahun 1930 penduduk Makassar mencapai 84.855 dengan komposisi 3.447 orang Eropa, 600 orang Arab, 15.363 orang Cina dan 65.445 orang Bumiputera.

Masyarakat Makassar di kenal dalam beberapa pelapisan sosial yang pertama adalah golongan bangsawan atau Karaeng, kedua adalah golongan To Maradeka atau To baji dan yang ketiga adalah golongan hamba atau Ata. Pelapisan semacam ini tentu sulit ditemukan pada masa sekarang karena perkembangan zaman yang telah meninggalkan hal-hal semacam itu. Namun terkadang pelapisan semacam ini masih di jumpai jika berbicara soal perkawinan.

Pelapisan sosial di kota Makasar pada masa kolonial di kenal dalam tiga struktur yang di perkenalkan sejak zaman speelman pada abad ke 17 hingga awal abad ke 20. Struktur masyarakat paling tinggi adalah orang-orang Eropa yang pada umumnya adalah pegawai pemerintahan dan militer yang bermukim di pusat pemerintahan dan perekonomian. Lapisan kedua di tempati oleh orang-orang timur asing seperti Cina, Arab, Pakistan, dan India. Mereka pada umumnya bergerak dalam bidang perekonomian. Sementara itu lapisan ketiga merupakan kalangan mayoritas adalah penduduk pribumi. Pekerjaan mereka beragam ada yang pegawai pemerintah, militer, petani, pedagang, nelayan hingga buruh-buruh kasar.

## D. Pembahasan

### 1. Makassar Menyambut Kemerdekaan 1945

Perubahan besar pada bulan agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang maha penting dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Pada saat itu perang pasifik memasuki fase terakhir, seiring dengan kemenangan kekuatan sekutu disatu pihak dan kekalahan Jepang di pihak yang lain. Ditengah kondisi ketidakpastian dan kekosongan kekuasaan dalam masa transisi

kekuasaan dari pihak yang kalah (Jepang) kepada pemenang sekutu, para pemimpin bangsa Indonesia beserta para pemuda dengan sigap mengisi saat yang genting itu untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsanya. Namun berita proklamasi kemerdekaan tidak diterima langsung dengan jelas di Sulawesi Selatan, disebabkan karena usaha Jepang untuk menutup-nutupi tentang proklamasi kemerdekaan. Akibatnya sangat sulit di dapatkan informasi tentang kemerdekaan. Penandatanganan piagam penyerahan Jepang pada sekutu dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945.

Berita tentang kekalahan Jepang dan pernyataan penyerahan kekuasaan kepada sekutu membangkitkan semangat yang meluap-luap dari pemuda-pemuda Indonesia yang selama ini bergiat bergiat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia agar mengimumkan kemerdekaan Indonesia (Harun, 1984). Suasana di Sulawesi selatan, terutama di Kota Makassar setelah penduduknya secara resmi mendengar berita Proklamasi kemerdekaan, memperlihatkan yang lain dari biasanya. Jika menjelang Proklamasi kemerdekaan terutama saat-saat terakhir masa pendudukan militer Jepang hampir semuanya diliputi oleh suasana ketakutan dan perasaan tertekan. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan suasana itu berubah menjadi yang diliputi kegembiraan. Semua lapisan sosial di masyarakat dari semua tingkatan umur dan kelompok etnik penduduk kota Makassar menyambut berita proklamasi dengan rasa sukur (Killa, 2014). Sejak diketahui bahwa diantara pasukan sekutu yang datang ke Makassar terdapat porsenil NICA, rakyat yang berada di Kota Makassar melakukan protes dengan melakukandemonstrasi mengibarkan bendera Merah Putih tanggal 27 September 1945. Pemuda hilir mudik dengan mengenakan lencana Meerah Putih sambil melancarkan tindakan perlawanan terhadap kegiatan NICA.

Sementara itu pemerintah NICA dengan keinginannya membentuk negara bagian (federasi) seperti wilayah timur besar mendirikan NIT (Negara Indonesia Timur) hal ini tentunya bersebrangan dengan pandangan pejuang-pejuang mudah Sulawesi Selatan yang siap untuk mati. Pemudah-pemudah Sulawesi Selatan berangkat ke Jawa untuk mencari bantuan dari MBT (Markas Besar Tentara) guna melakukan perjuangan Di sulawesi selatan. Akhir desember 1945 delegasi pemudah Selaesi tiba di Jawa yaitu Manai Sopian, kemudian Saleh Lahade dan Andi Matalatta. Mereka kemudian mencari rekan-rekan guna membantu perjuangan di Sulawesi selatan, satu-satunya kesatuan bersenjata yang dapat di ajak bekerjasama adalah Kahar Muzakkar dengan BKI (Barisan Kemajuan Indonesia)

## **2. Makassar Dibawah Bendera NIT 1946-1950**

### **a. Pembentukan NIT**

Sejak Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, Belanda terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kekuasaannya atas tanah jajahannya. Salah satu bentuk upaya Belanda adalah dengan membentuk negara-negara boneka, seperti halnya Negara Indonesia Timur.

Berbicara tentang perkembangan Kota Makassar pada masa-masa awal kemerdekaan, maka terlebih dahulu dibahas secara singkat tentang pemebntukan Propinsi Sulawesi. Sebelum dikenal sebagai daerah Sulawesi Selatan, wilayah yang dihuni oleh etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini dahulunya merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Gubernur yang pertama-tama ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangi. Adapun pusat pemerintahan Propinsi Sulawesi yaitu di Kota Makassar.

Masa kepemimpinan Ratulangi selaku Gubernur terbilang singkat, yakni sejak 17 Agustus 1945 - 5 April 1946. Pada 5 April 1946 Ratulangi dan beberapa Anggota KNIP ditangkap Belanda dan diasingkan ke daerah-daerah luar. Ratulangi sendiri diasingkan ke Papua (Anonim., 1953).

Secara teknis terjadi kekosongan pemerintahan di Sulawesi. Praktis kekosongan pemerintahan ini diambil alih oleh NICA. Dalam mengembangkan wilayah ini, tampil seorang intelektual Belanda bernama Van Mook, yang berhasil menghimpun kaum Feodal dan beberapa lawan politik Ratulangi untuk membentuk suatu Negara Federasi yang diwujudkan dalam Konfrensi Malino dan Konfrensi Denpasar. (Najamuddin., 2000)

Pada masa Negara Indonesia Timur, posisi Makassar ditempatkan sebagai Ibukota dari negara federal bentukan Belanda tersebut. Ketika NIT menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat, Kota Makassar dipimpin oleh seorang perempuan bernama Salawati Daud. Menjabat sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sebelum Salawati Daud menjabat seorang bernama Abdul Hamid Dg. Magassing pernah mencicipi jabatan ini dalam kurun tahun 1946-1949. Adapun penduduk Kota Makassar pada masa ini berdasarkan Tesis Najamuddin sebanyak 285.000 Jiwa. (Najamuddin., 2000)

Sejak dibentuknya negara Indonesia Timur terjadi gerakan-gerakan yang berupaya untuk kembali ke Negara Republik Indonesia. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai gerakan yang bersifat destruktif(merusak). Sehingga untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut pemerintah melakukan pendekatan kepada pemimpin gerakan dan masyarakat umum secara terus-menerus baik itu di Kota Makassar maupun dipedalaman atas dasar persetujuan RIS-RI mengenai pembentukan negara kesatuan, yang harus diusahakan sesuai dengan jalur hukum yang benar, bukan dengan memberontak.

Disebutkan didalam arsip bernomor register 104 bahwa dalam menghadapi gerakan-gerakan dan kegiatan rakyat itu, pihak pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti:

- a) Konferensi kepala-kepala daerah seluruh NIT pada tanggal 5-8 Juni 1950, di Makassar
- b) Rapat kepala-kepala *afdeling* seluruh daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 9-11 Juni 1950 di Makassar
- c) Permusyawaratan kepala-kepala *afdeling* seluruh daerah Sulawesi Selatan bersama-sama dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juni 1950 di Makassar.
- d) bidang dewan Sulawesi Selatan di Makassar pada tanggal 28-30 Juni 1950.

Bisa dilihat bahwa peran Kota Makassar pada masa Negara Indonesia Timur itu penting. Selain sebagai Ibu kota NIT, Makassar juga menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan berbagai macam kegiatan penting lainnya. Seperti halnya pada kutipan arsip diatas yang menunjukkan bahwa Makassar selalu dipilih menjadi tempat mengadakan pertemuan yang membahas gerakan-gerakan yang dianggap meresahkan oleh pemerintah Negara Indonesia Timur.

#### **b. Aspek Sosial Ekonomi**

Kota Makassar sejak dulu memiliki peran penting dalam dunia perekonomian. Sejak zaman kerajaan Gowa-Makassar hingga masuknya bangsa barat. Hal ini dikarenakan faktor letaknya yang strategis yang menghubungkan antara daerah barat dan timur serta utara dan selatan nusantara. Selain karena faktor tersebut, juga karena ketersediaan bahan makanan yang dibutuhkan oleh para pedagang yang singgah di Kota Makassar sebelum melanjutkan perjalanan.

Makassar pada masa pemerintah Indonesia Timur tetap menjadi pusat perekonomian untuk daerah Sulawesi

selatan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan perekonomian yang ada di Makassar ketika itu dapat dilihat pada pekerjaan Grosir yang merupakan kerjasama antara pihak asing dan jawatan-jawatan perekonomian serta dewan ekonomi Indonesia yang ada di Makassar, contohnya pengusaha-pengusaha Indonesia telah dipercaya untuk menjadi pengusaha grosir dari pabrik-pabrik kenamaan milik bangsa asing. Seperti N.V. pusat penjual gula Indonesia di Makassar untuk gula pasir dan N.V Serdid di Makassar untuk hasil-hasil Produksi dari Unilever.

Selain dalam bidang grosir kegiatan perekonomian juga dapat dilihat dengan adanya empat *dealer* mobil di Makassar. Jumlah ini merupakan yang terbanyak untuk pulau Sulawesi di susul dengan Manado dengan satu *dealer*. Selain itu juga ada usaha penggilingan padi yang bertambah jumlahnya di bandingkan sebelum terjadinya perang dunia II. Usaha semacam ini khusus di Kota Makassar terdapat dalaman pabrik.

Meningkatnya usaha-usaha penggilingan padi erat kaitannya dengan semakin membaiknya usaha pertanian yang ada di Provinsi Sulawesi pada umumnya dan Makassar pada khususnya. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya kementerian pertanian yang membuktikan bahwa usaha pertanian mendapatkan perhatian dari pemerintah, Kota Makassar berusaha untuk mencapai hasil tertinggi dan mutu terbaik dalam upaya membangun ekonominya. Tingginya minat masyarakat Sulawesi Selatan dalam wilayah pertanian tidak terlepas dari potensi alam yang mendukung masyarakat untuk turun ke ladang. Salah satunya ialah curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ini, curah hujan 200 mm/bulan yang berlangsung selama enam bulan dan turun sampai dibawah 100 mm selama tiga bulan setiap tahunnya memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk bertani (Mears, 1982).

Selain dari kondisi alam kondisi lahan juga berpengaruh dalam pengembangan produktifitas beras, lahan Sulawesi Selatan di kenal sebagai lahan yang sangat subur untuk tanaman padi dan amat baik untuk semua jenis persawahan, baik persawahan basah (irigasi) di tanah datar maupun persawahan kering (tenda hujan) di dataran tinggi (Muhlis, 2013). Namun patut diuraikan bahwa walaupun daerah Sulawesi Selatan secara umum dan Makassar secara khusus telah berada dalam kuasa Belanda dengan bentuk NIT, namun sistem kepemilikan tanah atau lahan persawahan masih mengadopsi gaya feodal, yakni kepemilikan tanah dikuasai oleh tuan tanah bangsawan dan *regent* atau kepala daerah (Muhlis, 2013).

Tanah persawahan ini bisa di kelolah sendiri atau dengan digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, bagi yang tidak mempunyai tanah dapat menggarap tanah pengusaha dengan mendapatkan 1/3 hasil panen. Kemudian didukung dengan beras yang cukup stabil dikurung tahun 1948-1950 rata-rata sekitar Rp 1,065.

Selain pada potensi alam persoalan ekonomi yang memberikan dorongan untuk turun kesawah, terdapat pula faktor budaya masyarakat Sulawesi Selatan, padi (Beras) di pandang sebagai penjelmaan *Sangiang Serri* atau Dewi Sri, yang sebagaimana masyarakat Sulawesi Selatan di percaya sebagai “pelindung” petani dalam mengelolah sawahnya. Salah satu bentuk penghormatan para petani ialah menaruh hasil panennya dilambung beras yang berada di bagian atas rumah tradisional Bugis-Makassar yang dikenal sebagai *rakkeang*, ditaruhnyaberbas dibagian atas rumah merupakan makna simbolik akan kedudukan yang tinggi atau terhormat, dan selain itu setiap selesai panen para petani biasa melaksanakan acara *Mappadandang* (Ahmadin, 2008).

Apa yang diuraikan dalam pembahasan ini memberikan gambaran bahwa beras tidak hanya penting dalam kaitannya

dengan permasalahan ekonomi belaka, beras juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan lokal. Berbicara mengenai pentingnya komoditi beras di Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Negara Indonesia Timur tidak terlepas dari perdagangan komoditi kopra dan permintaan beras dari daerah-daerah penghasil kopra (daerah minus beras), mengapa hubungan antara komoditi beras dan kopra perlu disinggung dalam pembahasan bab ini, karena dimasa Negara Indonesia Timur kedua komoditi dagang ini memiliki ketertarikan ekonomi satu sama lain. Peningkatan atas permintaan komoditi kopra ke berbagai tujuan ekspor seperti di Eropa dan Amerika mengindikasikan bahwa komoditi kopra begitu diminati dan meningkatkan nilai atau harga kopra di pasaran dunia (Najamuddin., 2000).

Selama tahun 1946 kapal-kapal barang ekspor dan impor makin meningkat aktivitasnya di pelabuhan Makassar hal ini mengakibatkan bahan makanan yang akan di distribusikan tertimun di dalam gudang-gudang pelabuhan karena menunggu giliran transportasi, sementara produksi hasil pertanian didaerah pedalaman Sulawesi seperti Wajo dan Soppeng mengalami peningkatan beras (Najamuddin., 2000).

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa beras dipandang sebagai komoditi penting di Sulawesi Selatan dan Makassar secara khusus pada masa Negara Indonesia Timur: pertama, beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat Sulawesi Selatan. Kedua, beras sebagai salah satu komoditi ekspor andalan Sulawesi Selatan yang diekspor ke berbagai daerah minus beras seperti Maluku. Ketiga, beras dapat ditukar dengan kopra seperti beberapa kasus yang terjadi di Maluku, dimana daerah Maluku adalah daerah penghasil kopra berkualitas baik yang sangat di inginkan pasaran Amerika dan Eropa.

Dalam laporan keuangan Negara Indonesia Timur menunjukkan bahwa

perekonomian di Negara Indonesia Timur berkembang dengan maju melampaui sebelum perang. majunya perekonomian itu tidak terlepas dari ekspor kopra. Kemajuan ekonomi itu disebabkan karena harga kopra di pasaran dunia membaik. Pada periode 1947-1949 ekspor kopra meningkat tahun 1947 tiga kali lipat di bandingkan tahun 1946, dan naik menjadi empat kali lipat pada tahun 1949. Naiknya ekspor kopra menunjukkan pula kopra di pasaran dunia semakin membaik. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa prestasi itu berkaitan erat dengan sarana prasarana pelabuan yang dari waktu ke waktu semakin baik. Jika dilihat dari perbandingan ekspor kopra dari berbagai daerah di Indonesia Timur tampaknya pelabuhan Makassar menjadi peringkat pertama dalam ekspor kopra. Kecenderungan meningkatnya ekspor kopra dari tahun ke tahun itu tidak terlepas dari peranan Belanda dalam mendukung munculnya negara Indonesia Timur.

Adapun ekspor kopra dari Makassar itu pada Umumnya di kirim ke Eropa khususnya Nederland. Misalnya ekspor kopra selama enam bulan pada tahun 1949 seperti tampak dalam tabel berikut. Tabel 4.1. Daerah tujuan kopra Makassar pada tahun 1949

Daerah Tujuan Ekspor	Jumlah dalam metrik ton
Nederland	108,038
Jerman	8,548
Amerika Serikat	13,310
Inggris	14,731
Belgia	4,064
Cekoslowakia	2,438
Kanada	3,709
Afrika Selatan	2,540
Polandia	505
Swiss	1,016
Singapura	2,134
Jepang	7,112
<b>Jumlah</b>	<b>168,148</b>

Sumber: Laporan *Ekonomische Brichten Oost Indonesia 1949*. Makassar 1949. Dalam Rasyid Asba. *Produksi dan Kebijakan Ekspor Kopra Makassar 1927-1958*. (Depok: Tesis pasca sarjana UI, 1997)

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ekspor kopra rata-rata setiap bulan, 28,028 ton pada tahun 1949. Dengan nilai rata-rata yang dicapai setiap bulan pada tahun 1949 itu berarti melampaui target yang dicapai pada tahun sebelumnya yang setiap bulan rata-rata yaitu 4.508 ton pada tahun 194, 12.719 ton pada tahun 1947, 20,187 ton pada tahun 1948. Jika dilihat dari nilai harga, maka harga kopra murni pada tahun 1947 adalah \$275 per ton kemudian pada bulan januari 1947 naik menjadi \$350 per ton dan pada bulan februari turun lebih rendah \$225 per ton dan kemudian membaik lagi pada Maret-April menjadi \$330 ton (Najamuddin, 2012 ). Ini menunjukkan bahwa konjunkturisasi harga kopra tidak menentu. Ada berbagai alasan mengapa harga kopra tidak menentu, pertama adalah tidak adanya kepastian harga di pasaran dunia. Kedua berbagai industri minyak belum normal seperti sebelum perang sehingga para eksportir sering melakukan penimbunan di gudang-gudang. Adanya ketidak pastian bagi masalah transportasi sehingga para konsumen tidak bisa mendapat kepastian.

### c. Pemberontakan di Kota Makassar Pada Masa NIT

Situasi keamanan di Kota Makassar pada masa-masa awal kemerdekaan belumlah stabil. Hal ini dikarenakan gejolak-gejolak yang timbul dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan-pemberontakan. Terutama menyangkut masalah KNIL dan APRIS seperti yang akan diuraikan pada bagian ini.

Penting untuk dikemukakan bahwa disamping kegiatan rakyat dan pemerintah ada pula pihak tentara yang secara aktif bertindak dalam penyelesaian masalah KNIL, dan gerilya yang sangat mempengaruhi jalannya usaha stabilisasi pemerintahan. Namun didalam arsip

register 104 ini secara tegas mengatakan bahwa persoalan mengenai KNIL dan Gerilya adalah persoalan khusus ketentaraan sehingga tidak mungkin bagi pemerintah daerah untuk menguraikan dalam warta politik ini, sebelum diperoleh hasil yang jelas dalam usaha penyelesaiannya, yang dapat diterangkan disini ialah mengenai usaha APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang telah melakukan pelucutan senjata dari satuan-satuan gerilya serta diusahakan pemasukan anggota-anggota gerilya yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan APRIS.

Namun usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, dan tidak memenuhi keinginan gerilya pada umumnya, seperti dengan banyaknya desas-desus yang berkembang pada waktu itu bahwa didalam kalangan gerilya timbul perasaan tidak senang. Dalam harian "pedoman" tertanggal 6 Juni 1950 No. 75 diterangkan bahwa dari anggota-anggota gerilya yang telah diperiksa dalam sektor Makassar sejumlah 3400 orang hanya 664 orang yang lulus dan diterima masuk ke APRIS jadi hanya kurang lebih 20%.

Perasaan tidak senang dikalangan para gerilyawan disebabkan karena adanya anggota-anggota KNIL berkebangsaan Indonesia yang diterima tanpa pembatasan (kecuali anggota KNIL yang memang tegas menolak bergabung dengan APRIS) sementara anggota-anggota gerilya sendiri dibatasi keanggotaannya didalam APRIS sehingga hal ini menimbulkan beban psikologis bagi mereka. Dijelaskan didalam Arsip tersebut bahwa para gerilyawan yang telah diterima masuk kedalam APRIS merasa tidak senang karena banyak temannya yang ditolak sehingga mereka melakukan pelarian kedalam hutan dengan membawa senjata yang telah mereka dapatkan di APRIS.

Mengenai pemerintahan selanjutnya dijelaskan didalam arsip ini bahwa pada saat itu, menjelang lahirnya Negara Kesatuan,



perhatian pemerintah daerah dikerahkan dan ditujukan sepenuhnya untuk stabilisasi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam usaha untuk membentuk Negara Kesatuan seperti yang telah terjadi pada bulan-bulan sebelumnya (April-Agustus).

Berikut ini akan diuraikan mengenai isi Arsip bernomor register 97 dengan judul "Warta Politik NIT didalamnya mengemukakan antara lain mengenai pemberontakan KNIL/Kapten Andi Aziz di Makassar Januari-Agustus 1950". Didalam Arsip ini dijelaskan mengenai beberapa pemberontakan yang terjadi yang pada awalnya disebabkan karena keputusan pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mendatangkan tentara APRIS ke Indonesia Timur yang dipusatkan di Makassar. Ada dua bentuk reaksi yang timbul dengan dikeluarkannya tersebut, yang pertama disambut gembira oleh masyarakat, partai politik, dan organisasi yang sudah sejak lama mendesak pemerintah untuk mendatangkan APRIS. Reaksi kedua adalah penolakan yang dilakukan oleh golongan *federalisten* (orang-orang yang pro terhadap bentuk negara federal/serikat), dan anggota-anggota KNIL yang tidak setuju dengan kedatangan APRIS.

Dibawah pimpinan *Sergeant Major Christoffel* pada tanggal 3 April 1950 diadakan rapat yang dihadiri oleh kurang lebih 700 orang KNIL di *Alhambra Theater*. Rapat tersebut menentang kedatangan Batalyon Worang di Makassar. Sehingga rencana pendaratan Batalyon Worang pada tanggal 5 April 1950 ditunda selama 15 hari. Baru kemudian pada tanggal 20 April 1950 pendaratan tersebut bisa dilakukan di Jeneponto, untuk kemudian bergerak menuju kota Makassar dan pada tanggal 21 April 1950, seluruh kota Makassar berhasil dikendalikan dibawah pimpinan APRIS. Pendaratan Batalyon Worang di Jeneponto mendapat

bantuan sepenuhnya dari rakyat, dan terutama oleh golongan gerilya.

Pada awalnya kerjasama antara tentara dan barisan gerilya sangat memuaskan. Namun, dalam perkembangannya terjadi perselisihan diantara mereka sehingga melambatkan dan melemahkan usaha-usaha pembangunan dan kemakmuran, serta melemahkan persatuan diantara keduanya. Adapun pemberontakan-pemberontakan yang dituliskan didalam arsip bernomor register 97 ini akan dijelaskan pada uraian berikut:

### 1) Pemberontakan Kapten Andi Aziz (5 April 1950)

Dijelaskan dalam warta politik ini bahwa terjadi pertentangan-pertentangan politik yang semakin hari semakin dibesarkan setelah penyerahan kedaulatan dan kemerdekaan. Pada waktu itu, golongan-golongan yang merasa dirinya seakan mendapat kekalahan dalam memperthankan penjajahan Belanda di tanah air merasa terjepit pada masa kemerdekaan. Mereka berusaha untuk mencari jalan untuk mengembalikan keadaan seperti pada masa silam. Dari tinjauan ini, tidak hanya melihat kepada kejadian-kejadian dan akibat-akibatnya, tetapi juga perlu diperhatikan mengenai penyebab munculnya kejadian tersebut. Kejadian-kejadian ini muncul akibat propaganda yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Pada tanggal 5 April 1950, kira-kira jam 5 pagi bersamaan dengan penahanan atas Kolonel Mokoginta, maka anggota-anggota ketentaraan APRIS telah diserang, ditangkap, dan ditahan. Sepanjang pesisir pantai Makassar diperkuat oleh meriam dibawah pimpinan kapten Andi Aziz, yang baru saja beberapa hari masuk sebagai anggota APRIS, dengan mendapat bantuan penuh dari KNIL dan polisi negara, seluruh kota Makassar telah dikuasainya. Didalam pemberontakan ini, rakyat tetap memberikan dukungan kepada

tentara APRIS, sedang dari pihak gerilya mereka juga memberikan bantuan secara penuh. Dengan dibawahnya Andi Aziz ke Jakarta maka gerakan Aziz ini menjadi lemah dan dengan tibanya batalyon Worang di Makassar, maka selesailah sejarah pemberontakan tersebut. Adapun anak buah Aziz (bekas KNIL yang masuk APRIS) mereka diangkut ke Semarang dan disana mereka dimasukkan kembali dalam tentara APRIS. Pada masa ini mereka juga turut ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa penyerangan yang terjadi di daerah Kebumen.

## 2) Pemberontakan KNIL 15-19 Mei 1950 di Makassar

Meskipun penyerangan Andi Aziz telah dibasmi, dan orang-orangnya pun telah diangkat ke Jawa, akan tetapi ketegangan di Makassar sebenarnya tidak berkurang, karena Andi Aziz dan kawan-kawannya hanyalah alat-alat dari pada pihak ketiga yang bermaksud merusak dan mengaduh domba kala itu sama halnya dengan terjadi pada tentara KNIL. Pihak ketiga tersebut adalah golongan reaksioner dari pihak Belanda yang setiap harinya berinteraksi dengan golongan KNIL, tidak suka melihat Indonesia yang telah diakui kemerdekaan dan kedaulatannya itu, ditinggal dengan aman dan damai.

Pemberontakan ini, yang disebut pemberontakan kedua di Makassar terjadi pada tanggal 15 Mei 1950, dimulai pada jam 7 pagi, sepanjang jalan Hasanuddin dan Penghibur sampai ke jalan Karebosi dan berputar terus ke jalan Istana Maricaya, dan Jalan Monginsidi. Selama tiga hari pertempuran berjalan, pihak KNIL telah mempergunakan senjata-senjata ringan dan berat bahkan dengan tank-tank disepanjang jalan-jalan besar. Dalam pertempuran ini, tentara APRIS telah dibantu oleh barisan-barisan gerilya yang datang dari daerah-daerah pedalaman, tak ketinggalan rakyat dimana-mana pun juga ikut memberikan bantuannya. Pertempuran ini, baru dihentikan pada tanggal 19 Mei 1950.

Didalam Arsip bernomor register 97 ini tidak disebutkan secara pasti mengenai jumlah korban yang diakibatkan dari pemberontakan kedua ini, yang disebutkan hanyalah korban-korban yang dapat dilaporkan banyak orang yang meninggal banyak pula orang yang luka-luka, sedang kerugian ditaksir kira beribu-ribu rupiah. Penyerangan KNIL ini, sangat melukai hati rakyat sehingga kebencian rakyat terhadap KNIL semakin bertambah.

## 3) Pemberontakan KL (KNIL) di Makassar (5 Agustus 1950)

Sebelum terjadi pertempuran-pertempuran yang dimulai oleh KL, suasana di Kota Makassar sudah sangat genting. Serdadu-serdadu KL mengadakan berbagai tindakan biadab di kampung Mariso dan Balang Baru dengan memperkosa gadis-gadis dan istri-istri dari beberapa penduduk. Ancaman dengan senjata terhadap pemuda dan orang-orang dari KNIL tidak berkurang, begitupun dipasar-pasar dan toko-toko terutama di sepanjang kampung Baru. Selama presiden RIS berada di Makassar, maka kegentingan-kegentingan tersebut selalu bertambah, dan bendera sang saka merah putih didaerah yang dikendalikan KL kebanyakan diturunkan dan dirobek-robek, begitupun dengan foto-foto dari presiden RIS tidak luput, diturunkan dari dinding-dinding dan diinjak-injak. Selain hal tersebut, KL juga melakukan pembunuhan terhadap seorang Letnan dari APRIS yang bernama Eikel di Mattoanging.

Penyerangan KL dimulai pada tanggal 5 Agustus 1950 pada jam setengah enam petang, yang dijalankan secara serentak disepanjang jalan Merdeka-Maricaya-Syahrir-Sultan Hasanuddin terus berputar ke pantai Makassar yang berbatasan dengan Fort Rotterdam. Sewaktu pertempuran-pertempuran ini berjalan dengan hebatnya, maka pembakaran rumah disekitar kampung Baru-Galesong-Mariso dan Maricaya pun tambah menggemparkan rakyat diseluruh kota Makassar, yang

melarikan diri dari kebakaran-kebakaran tersebut diantara dentuman-dentuman senjata dan ditengah hujan peluru.

Pertempuran ini baru dapat dihentikan pada tanggal 9 Agustus 1950, sesudah didapat persetujuan dalam perundingan antara kolonel Kawilarang dengan Jenderal Mayor Scheffelaar yang menetapkan penghentian tembak-menembak, penyerahan senjata berat termasuk tank-tank Baja, dan senjata ringan dan lain-lain. Adapun mengenai pengangkutan KL harus dipercepat dan selambat-lambatnya diselesaikan pada tanggal 23 Agustus 1950. Pihak KL dengan segera melaksanakan keputusan ini sehingga pada tanggal 21 Agustus 1950, Makassar telah dikosongkan dari rombongan tentara KL. Pertempuran-pertempuran ini membawa kerugian yang besar, ada 800 orang korban tewas, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka, dan 200 buah rumah terbakar.

Menurut berita yang disiarkan di Makassar kala itu, kerugian-kerugian yang diderita akibat ketiga pertempuran tersebut besarnya kira-kira 500 juta rupiah. Usaha-usaha pertolongan telah dijalankan oleh Palang Merah Indonesia, sementara pihak pemerintah mengusakan pembangunan tempat-tempat pengungsian untuk menempatkan korban yang telah kehilangan rumahnya.

### E. Kesimpulan

perkembangan Kota Makassar pada masa-masa awal kemerdekaan, maka terlebih dahulu dibahas secara singkat tentang pemebntukan Propinsi Sulawesi. Sebelum dikenal sebagai daerah Sulawesi Selatan, wilayah yang dihuni oleh etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini dahulunya merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Gubernur yang pertama-tama ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangi. Adapun pusat pemerintahan Propinsi Sulawesi yaitu di Kota Makassar.

Sejak dibentuknya negara Indonesia Tumur terjadi gerakan-gerakan yang berupaya untuk kembali ke Negara Republik Indonesia. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai gerakan yang bersifat destruktif (merusak).

Sehingga untuk mengatasi gerakan-gerakan tersebut pemerintah melakukan pendekatan kepada pemimpin gerakan dan masyarakat umum secara terus-menerus baik itu di Kota Makassar maupun dipedalaman atas dasar persetujuan RIS-RI mengenai pembentukan negara kesatuan, yang harus diusahakan sesuai dengan jalur hukum yang benar, bukan dengan memberontak

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. (2008). *Kapitalisme Bugis Aspek Sosio Kultural Dalam Etika Bisnis Orang Bugis*. Makassar: Refleksi .
- Anonim. (1953). *Republik Indonesia : Propinsi Sulawesi*. Makassar : Djawatan Penerangan Propinsi Sulawes.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. (Yogyakarta: Ombak.
- Daliman., A. (2015). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: : Ombak.
- Dr.H.Sulasman. (2010). *Metodologi penelitian sejarah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Harun, K. (1984). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: Ujung Pandang; kerjasama Bappeda TK 1 Provinsi Sulawesi Selatan dan Unhas.
- Helius Sjamsuddin. (2012). *Metodoogi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Killa, S. (2014). *Trips Dalam Dalam Perjuangan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Makassar: LAMACCA.
- Mears, L. A. ( 1982). *Era Baru Ekonomi Perberasan Idonesia* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muhlis, N. ( 2013). *Produksi dan perdagangan Beras Sulawesi Bagian Selatan di Akhir Abad ke-19*. makassar: skripsi

(Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Najamuddin. (2012 ). Analisis Historis Terhadap Potensi Ekonomi di Sulawesi Selatan Indonesia Bagian Timur 1945-1949, Jurnal (Yogyakarta: Socia. Vol. , No. 1 Mei . *II* (Universitas Negeri Yogyakarta).

Najamuddin. (2000). *Sulawesi Selatan : Pergumulan antara Negara Kesatuan dan Negara Federal 1946-1949*. Jakarta: Tesis ( : Universitas Indonesia,.

Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sukatanya, Y. (2000). *Dari Makassar ke Makassar dalam Udhin Palisuri, dkk. Makassar Doeloe, Makassar Kini, Makassar Nanti*. Makassar : Yayasan Losari Makassar,.

